



▶ SEKOLAH RAKYAT DI DIY

Pendaftar 700, Diterima 150 Siswa

Lugas Subarkah & Alifian Asma'iyi
redaksi@jibnews.co

JOGJA—Minat warga untuk masuk ke Sekolah Rakyat tingkat SMA di DIY sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pendaftar Sekolah Rakyat di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) milik Kementerian Sosial di dua lokasi di DIY, Sonosewu dan Purwomartani.

▶ Halaman 10

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintersih, menjelaskan pendaftaran Sekolah Rakyat dibuka sejak 1 hingga 30 April 2025.

"Pendaftar telah mencapai sekitar 700 orang, sementara kuota yang tersedia masih terbatas. Namun, angka ini masih memerlukan proses verifikasi lebih lanjut," ujarnya, Kamis (8/5).

Adapun kuota yang dibuka untuk Sekolah Rakyat di dua lokasi tersebut hanya 150 orang, dengan rincian Sekolah Rakyat di Sonosewu 100 orang dan Purwomartani 50 orang. "Karena tingginya animo masyarakat, saat ini sedang dibahas kemungkinan penambahan kuota," katanya.

Dinsos DIY sedang mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung agar dapat menampung sekitar 300 siswa, dengan rincian 200 siswa di Sonosewu dan 100 siswa di Purwomartani. "Kami melihat tingginya pendaftar sebagai bentuk euforia yang positif, mencerminkan besarnya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka," ungkapnya.

Saat ini, Dinas Sosial DIY sedang menjalankan proses verifikasi lapangan terhadap para pendaftar. "Tim akan turun langsung untuk mengumpulkan data dan melakukan pemetaan terhadap profil anak dan kondisi rumah. Kondisi tempat tinggal menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan penerimaan," kata dia.

Hasil seleksi ini akan menentukan siapa saja yang benar-benar layak untuk diterima sebagai siswa Sekolah Rakyat. "Kami didukung oleh 728 pendamping yang memahami kondisi lapangan secara menyeluruh. Mereka akan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah calon siswa untuk memotret kondisi anak dan lingkungan tempat tinggalnya,"

ungkapnya.

Seleksi siswa tidak berbasis nilai akademik, melainkan menekankan pada kemampuan, kemauan, dan motivasi anak untuk bersekolah, serta dukungan dari orang tua. "Semua aspek ini akan dicatat dalam profil masing-masing calon siswa, yang menjadi dasar pengambilan keputusan," jelasnya.

Selain aspek administratif, verifikasi juga mencakup komitmen anak dan orang tua. Pihaknya akan memastikan bahwa calon peserta memang memiliki keinginan kuat untuk bersekolah. "Begitu pula dengan orang tuanya. Jangan sampai anaknya ingin bersekolah, tetapi tidak diizinkan oleh orang tua karena harus tinggal di asrama," ujarnya.

Proses Pembangunan

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat, Maulidya Indah Junica, menyebut telah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan pembangunan 100 Sekolah Rakyat per tahun.

Maulidya menyebut pada tahap awal pemerintah bakal merenovasi 65 sekolah yang bakal diubah statusnya menjadi sekolah rakyat pada tahun ini. "Kalau arahan Presiden, total 100 Sekolah Rakyat [per tahun]. Jadi kita masih berproses dengan Kemensos untuk mencapai lokasi yang 100 sekolah rakyat itu," kata Maulidya saat ditemui di kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (7/5).

Maulidya menyebut pembangunan 100 Sekolah Rakyat pada tahun ini akan dilakukan lewat 2 tahap pembangunan. Tahap pertama, pemerintah bakal melakukan renovasi pada 65 sekolah di

sejumlah wilayah menjadi Sekolah Rakyat. Rencananya, renovasi 65 Sekolah Rakyat itu bakal mulai di eksekusi pada minggu ke-3 Mei 2025. Sebanyak 65 sekolah yang bakal direnovasi itu merupakan sekolah yang sudah ada milik Kemensos, perguruan tinggi, pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta.

"Tahap kedua untuk tahun ajaran berikutnya. Bukan tahun ajaran ini. Jadi yang 65 sekolah untuk tahun ajaran 2025-2026 dan tahap kedua 2026-2027," ujarnya.

Saat dikonfirmasi berapa anggaran yang telah disiapkan untuk melakukan pembangunan Sekolah Rakyat itu, Maulidya enggan merinci. Dia menyebut, kajian anggaran hingga saat ini masih dilakukan. Namun, secara umum anggarannya tak akan jauh berbeda dari yang sempat disebutkan oleh pemerintah sebelumnya berkisar Rp100 miliar per sekolah.

"Nah, ini yang lagi masih di-exercise teman-teman. Tapi ya sekitar itu [Rp100 miliar] karena kan bukan hanya membangun, ada pemetaan lahannya ada mebelnya. Jadi masih exercise semua," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan sekolah rakyat bakal mencapai Rp100 miliar per sekolah. "[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah," ujarnya.

Menurut Cak Imin, pembangunan Sekolah Rakyat segera dimulai, dan tahun ajaran depan sekolah ini sudah bisa menerima siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. (JIBI/Bisnis.com)